

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

---

### Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b>	1
<b>Diagram Hubungan Antar Bab</b>	3
<b>BAB I : Ketentuan Umum</b>	4
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 1	4
<b>BAB II : Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup</b>	4
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab II	4
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab II	4
<b>BAB III : Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha</b>	5
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab III	5
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab X	9
<b>BAB IV : Ketenagakerjaan</b>	14
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab IV	14
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab IV	14
<b>BAB V : Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</b>	15
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 5	15
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 5	16
<b>BAB VI : Kemudahan Berusaha</b>	18
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 6	18
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 6	19
<b>BAB VII : Dukungan Riset dan Inovasi</b>	21
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 7	21
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 7	21
<b>BAB VIII : Pengadaan Tanah</b>	22
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 8	22
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 8	23
<b>BAB IX : Kawasan Ekonomi</b>	25
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 9	25
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab IX	25
<b>BAB X : Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional</b>	27
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 10	27
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab X	27
<b>BAB XI : Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja</b>	29
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 11	29
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab XI	29
<b>BAB XII : Pengawasan dan Pembinaan</b>	30
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 12	30
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab XII	30
<b>BAB XIII : Ketentuan Lain-Lain</b>	31
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab XIII	31
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab XIII	31

Ikhtisar:

## **UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

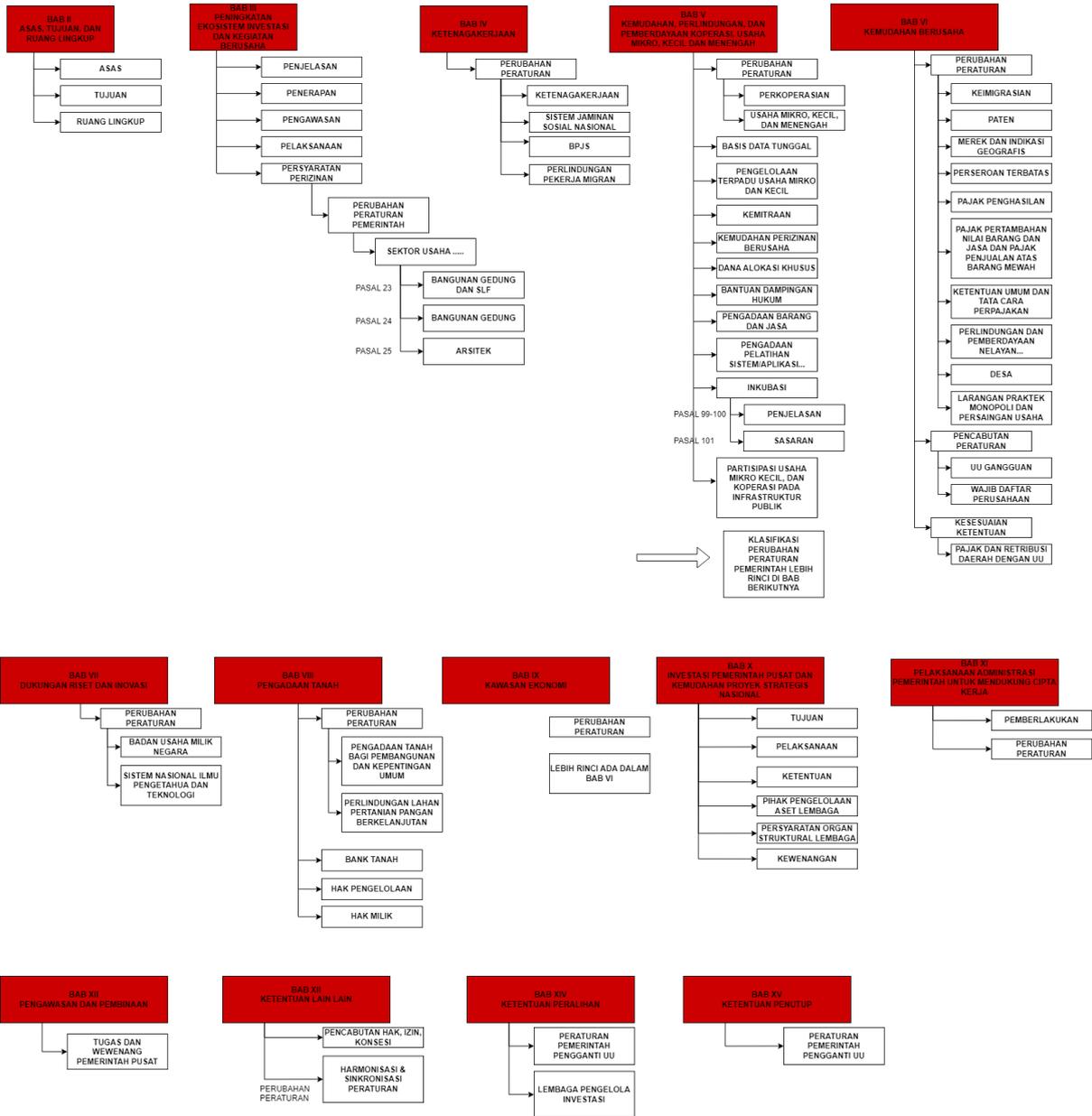
---

<b>BAB XIV : Ketentuan Peralihan</b>	32
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 14	32
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 14	32
<b>BAB XV : Ketentuan Penutup</b>	33
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 15	33
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 15	33

Ikhtisar:

# UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

## Diagram Hubungan Antar Bab



Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

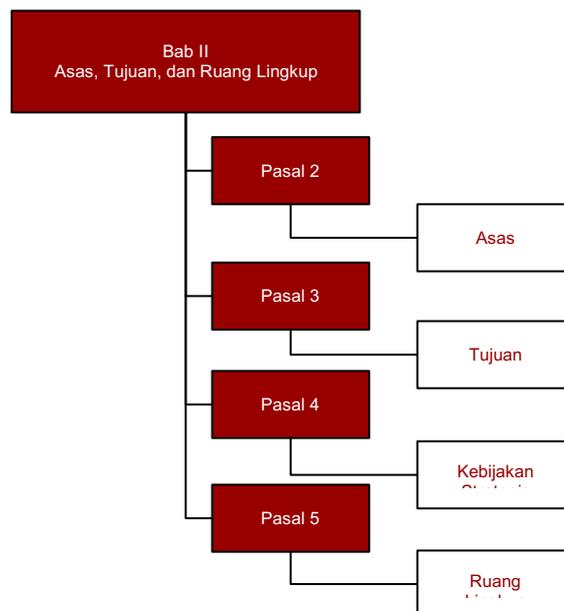
### BAB I : Ketentuan Umum

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 1

Pasal 1	Pengertian dan Penjelasan mengenai Cipta Kerja
---------	--

### BAB II : Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab II



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab II

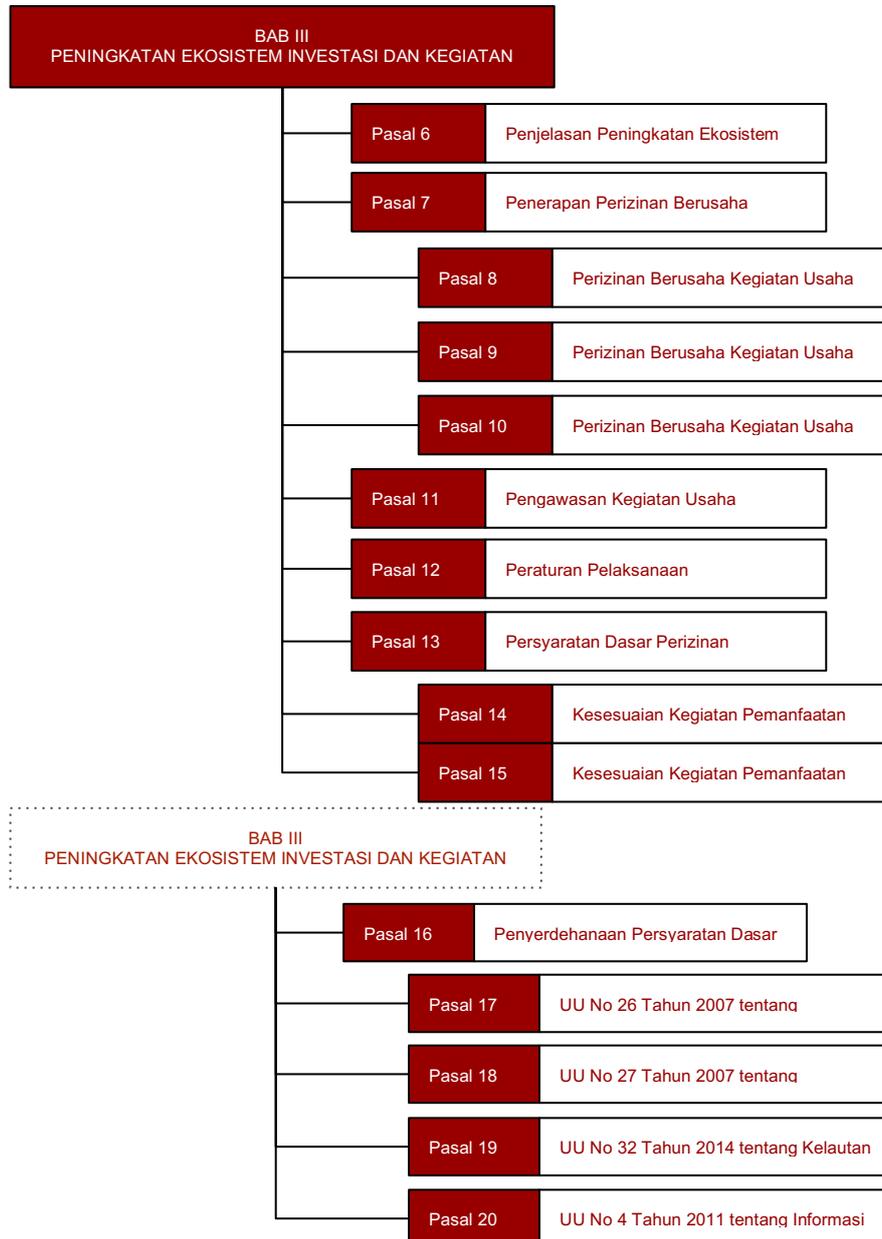
Pasal 2	Asas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Pasal 3	Tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Pasal 4	Kebijakan Strategis Cipta Kerja
Pasal 5	Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

### BAB III : Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab III



Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

### BAB III PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

Pasal 21	Persetujuan Lingkungan
Pasal 22	Perubahan Ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Badan Usaha dan Penyelenggaraan Lingkungan Hidup
Pasal 23	Persetujuan Bangunan gedung dan Sertifikat Laik Fungsi
Pasal 24	Perubahan Ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perencanaan Wilayah dan Kota
Pasal 25	Perubahan Ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Pasal 26	Perubahan Ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Pasal 27	Kemudahan dan Persyaratan Investasi Perizinan Berusaha
Pasal 28	Sektor Pertanian
Pasal 29	UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Pasal 30	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Pasal 31	UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Padi
Pasal 32	UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengembangan Data

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

**BAB III**  
**PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA**

Pasal 33	UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pasal 34	UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Pasal 35	Kemudahan Perizinan Berusaha dari Sektor Kehutanan
Pasal 36	UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Pasal 37	UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pasal 38	Kemudahan Perizinan Berusaha dari Sektor Energi dan
Pasal 39	UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Pasal 40	UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Pasal 41	UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
Pasal 42	UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Pasal 43	UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
Pasal 44	UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

### BAB III PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

Pasal 45	Sektor Perdagangan, Metrologi Legal, jaminan Produk Halal,
Pasal 46	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Pasal 47	UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Pasal 48	UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Pasal 49	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pasal 50	UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Pasal 51	UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Pasal 52	UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Pasal 53	Perubahan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang

### BAB III PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN

Pasal 54	Sektor Transportasi
Pasal 55	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Pasal 56	UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Pasal 57	UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran
Pasal 58	UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Pasal 59	Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan
Pasal 60	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 61	UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Pasal 62	UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
Pasal 63	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Pasal 64	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

BAB III  
PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN

Pasal 65	Pelaksanaan Perizinan Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 66	UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
Pasal 67	UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
Pasal 68	UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pasal 69	Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
Pasal 70	UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
Pasal 71	UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Pasal 72	UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pasal 73	Sektor Pertahanan dan Keamanan
Pasal 74	UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri
Pasal 75	UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

BAB III  
PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN

Pasal 76	Penyerderhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu
Pasal 77	UU nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Pasal 78	UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Pasal 79	UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab X

Pasal 6	Penjelasan Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
Pasal 7	Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Pasal 8	Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah
Pasal 9	Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah
Pasal 10	Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Pasal 11	Pengawasan Kegiatan Usaha
Pasal 12	Peraturan Pelaksanaan
Pasal 13	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
Pasal 14	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR
Pasal 15	Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Tanpa RDTR)
Pasal 16	Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
Pasal 17	Perubahan Ketentuan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Pasal 18	Perubahan Ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 19	Perubahan Ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Pasal 20	Perubahan Ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
Pasal 21	Persetujuan Lingkungan
Pasal 22	Perubahan Ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 23	Persetujuan Bangunan gedung dan Sertifikat Laik Fungsi
Pasal 24	Perubahan Ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Pasal 25	Perubahan Ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Pasal 26	Penyederhanaan <b>Perizinan Berusaha</b> Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi
Pasal 27	Perubahan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Pasal 28	Perubahan Peraturan untuk Kemudahan Persizinan Berusaha dari Sektor Pertanian
Pasal 29	Perubahan ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Pasal 30	Perubahan ketentuan dalam UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Pasal 31	Perubahan ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
Pasal 32	Perubahan ketentuan dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Pasal 33	Perubahan ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultur
Pasal 34	Perubahan ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 35	Perubahan Peraturan untuk Kemudahan Perizinan Berusaha dari Sektor Kehutanan
Pasal 36	Perubahan ketentuan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Pasal 37	Perubahan ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Pasal 38	Perubahan Peraturan untuk Kemudahan Perizinan Berusaha dari Sektor <b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>
Pasal 39	Perubahan ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pasal 40	Perubahan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Pasal 41	Perubahan ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
Pasal 42	Perubahan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Pasal 43	Perubahan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
Pasal 44	Perubahan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Pasal 45	Perubahan Peraturan dari Sektor Perdagangan, Metrologi Legal, jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Pasal 46	Perubahan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Pasal 47	Perubahan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Pasal 48	Perubahan ketentuan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Pasal 49	Perubahan Peraturan dari Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Pasal 50	Perubahan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 51	Perubahan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Pasal 52	Perubahan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Pasal 53	Perubahan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
Pasal 54	Perubahan Peraturan dari Sektor Transportasi
Pasal 55	Perubahan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 56	Perubahan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Pasal 57	Perubahan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran
Pasal 58	Perubahan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Pasal 59	Perubahan Peraturan dalam Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan
Pasal 60	Perubahan ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 61	Perubahan ketentuan dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Pasal 62	Perubahan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Pasal 63	Perubahan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Pasal 64	Perubahan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Pasal 65	Pelaksanaan Perizinan Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 66	Perubahan Peraturan UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
Pasal 67	Perubahan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
Pasal 68	Perubahan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Pasal 69	Perubahan peraturan dari Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Ikhtisar:

## **UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

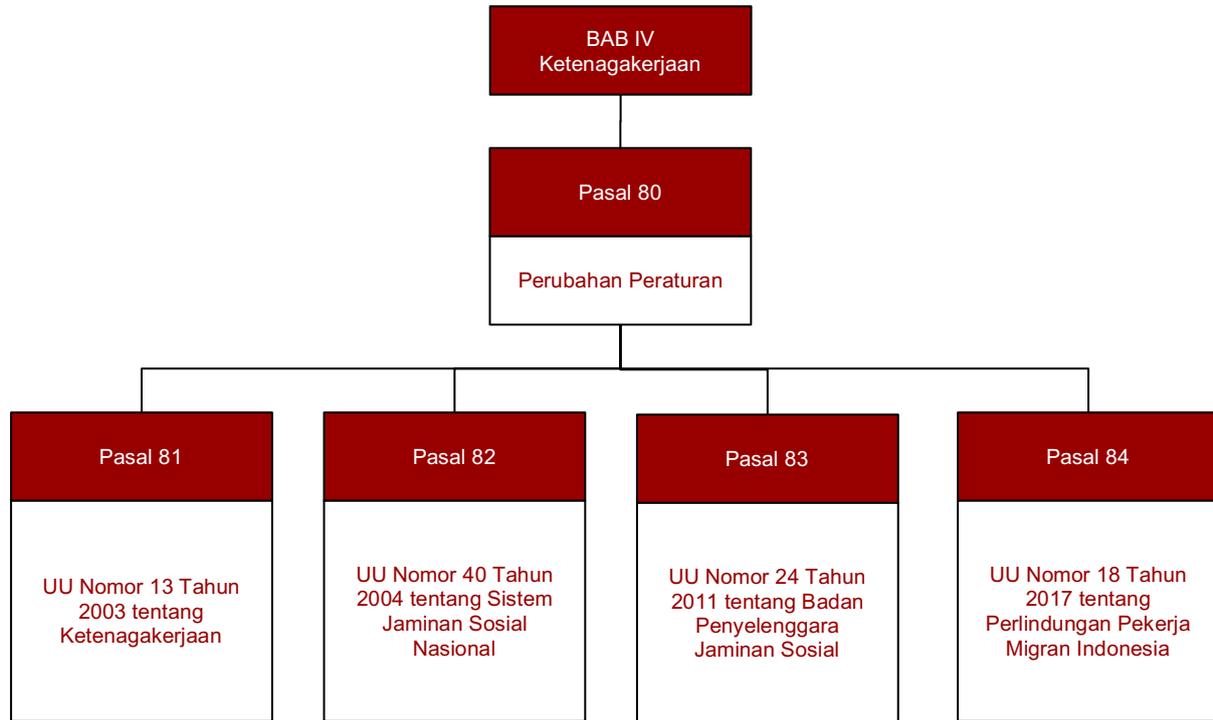
Pasal 70	Perubahan ketentuan UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
Pasal 71	Perubahan ketentuan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Pasal 72	Perubahan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pasal 73	Perubahan Peraturan Sektor Pertahanan dan Keamanan
Pasal 74	Perubahan ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
Pasal 75	Perubahan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 76	Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu (Penanaman Modal, Perbankan, Perbankan Syariah)
Pasal 77	Perubahan ketentuan UU nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Pasal 78	Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Pasal 79	Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

### BAB IV : Ketenagakerjaan

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab IV



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab IV

Pasal 80	Perubahan Peraturan tentang Ketenagakerjaan
Pasal 81	Perubahan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 82	Perubahan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Pasal 83	Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Pasal 84	Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

### **BAB V : Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 5



Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 5

Bagian Kesatu	
Pasal 85	Perubahan, penghapusan, atau penetapan pengaturan baru Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 25 Tahun 1992, UU No 20 Tahun 2008, UU No 38 Tahun 2004
Bagian Kedua	
Pasal 86	Perubahan ketentuan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Bagian Ketiga	
Pasal 87	Perubahan ketentuan UU No 20 Tahun 2008 tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Bagian Keempat	
Pasal 88	Pengertian dan Penjelasan tentang Basis Data Tunggal
Bagian Kelima	
Pasal 89	Pengertian dan Penjelasan tentang Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil
Bagian Keenam	
Pasal 90	Pengertian dan Penjelasan tentang Kemitraan
Bagian Ketujuh	
Pasal 91	Pengertian dan Penjelasan tentang Kemudahan Perizinan Berusaha
Bagian Kedelapan	
Pasal 92-94	Pengertian dan Penjelasan tentang Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif Fiskal
Bagian Kesembilan	
Pasal 95	Penjelasan tentang Dana Alokasi Khusus
Pasal 96	Penjelasan tentang Bantuan dan Pendampingan Hukum

Ikhtisar:

## **UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

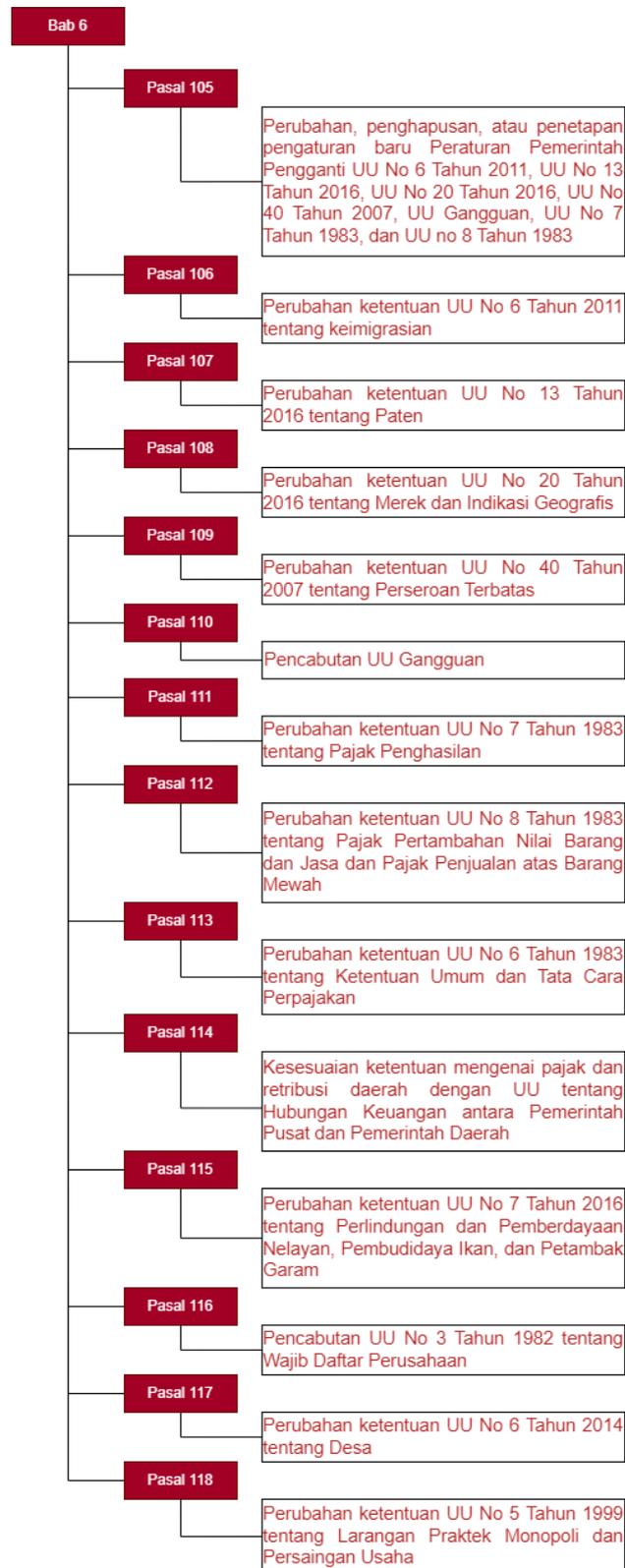
Pasal 97	Penjelasan tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 98	Penjelasan tentang Pengadaan Pelatihan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan
Pasal 99-100	Penjelasan tentang Inkubasi
Pasal 101	Sasaran Inkubasi
Pasal 102	Pengadaan Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas UMK-M
Bagian Kesepuluh	
Pasal 103	Perubahan ketentuan di antara Pasal 53 dan Pasal 54 dalam UU No 38 Tahun 2004 tentang Partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi pada Infrastruktur Publik

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

### BAB VI : Kemudahan Berusaha

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 6



Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 6

Bagian Kesatu	
Pasal 105	Perubahan, penghapusan, atau penetapan pengaturan baru Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 6 Tahun 2011, UU No 13 Tahun 2016, UU No 20 Tahun 2016, UU No 40 Tahun 2007, UU Gangguan, UU No 7 Tahun 1983, dan UU no 8 Tahun 1983
Bagian Kedua	
Pasal 106	Perubahan ketentuan UU No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian
Bagian Ketiga	
Pasal 107	Perubahan ketentuan UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten
Bagian Keempat	
Pasal 108	Perubahan ketentuan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Bagian Kelima	
Pasal 109	Perubahan ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Bagian Keenam	
Pasal 110	Pencabutan UU Gangguan
Bagian Ketujuh	
Pasal 111	Perubahan ketentuan UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Pasal 112	Perubahan ketentuan UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pasal 113	Perubahan ketentuan UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pasal 114	Kesesuaian ketentuan mengenai pajak dan retribusi daerah dengan UU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Bagian Kedelapan	

Ikhtisar:

**UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

Pasal 115	Perubahan ketentuan UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
Bagian Kesembilan	
Pasal 116	Pencabutan UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
Bagian Kesepuluh	
Pasal 117	Perubahan ketentuan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
Bagian Kesebelas	
Pasal 118	Perubahan ketentuan UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

### BAB VII : Dukungan Riset dan Inovasi

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 7



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 7

Pasal 119	Perubahan, penghapusan, atau penetapan pengaturan baru Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 19 Tahun 2003 dan UU No 11 Tahun 2019
Pasal 120	Perubahan ketentuan UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Pasal 121	Perubahan ketentuan Pasal 48 dalam UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ikhtisar:

# UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

## BAB VIII : Pengadaan Tanah

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 8



Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 8

Bagian Kesatu	
Pasal 122	Perubahan, penghapusan, atau penetapan pengaturan baru Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2012 dan UU No 41 Tahun 2009
Bagian Kedua	
Pasal 123	Perubahan ketentuan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Bagian Ketiga	
Pasal 124	Perubahan ketentuan UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Bagian Keempat	
Pasal 125	Pengertian dan penjelasan tentang bank tanah
Pasal 126-127	Tugas Bank Tanah
Pasal 128	Sumber Kekayaan Badan bank tanah
Pasal 129	Hak pengelolaan badan bank tanah
Pasal 130	Struktur Organisasi badan bank tanah
Pasal 131-134	Penjelasan tentang struktur organisasi badan bank tanah
Pasal 135	Ketentuan lebih lanjut mengenai badan bank tanah
Pasal 136	Pengertian Hak Pengelolaan
Pasal 137	Pemberian Hak Pengelolaan
Pasal 138	Penyerahan pemanfaatan bagian tanah hak pengelolaan
Pasal 139	Pembatalan dan/atau pencabutan hak pengelolaan
Pasal 140	Penjelasan tentang hak milik
Pasal 141	Evaluasi pemanfaatan hak atas tanah
Pasal 142	Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan
Pasal 143-144	Penjelasan tentang hak milik atas satuan rumah susun
Pasal 145	Penjelasan tentang tanah hak guna bangunan untuk rumah susun

Ikhtisar:

**UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

---

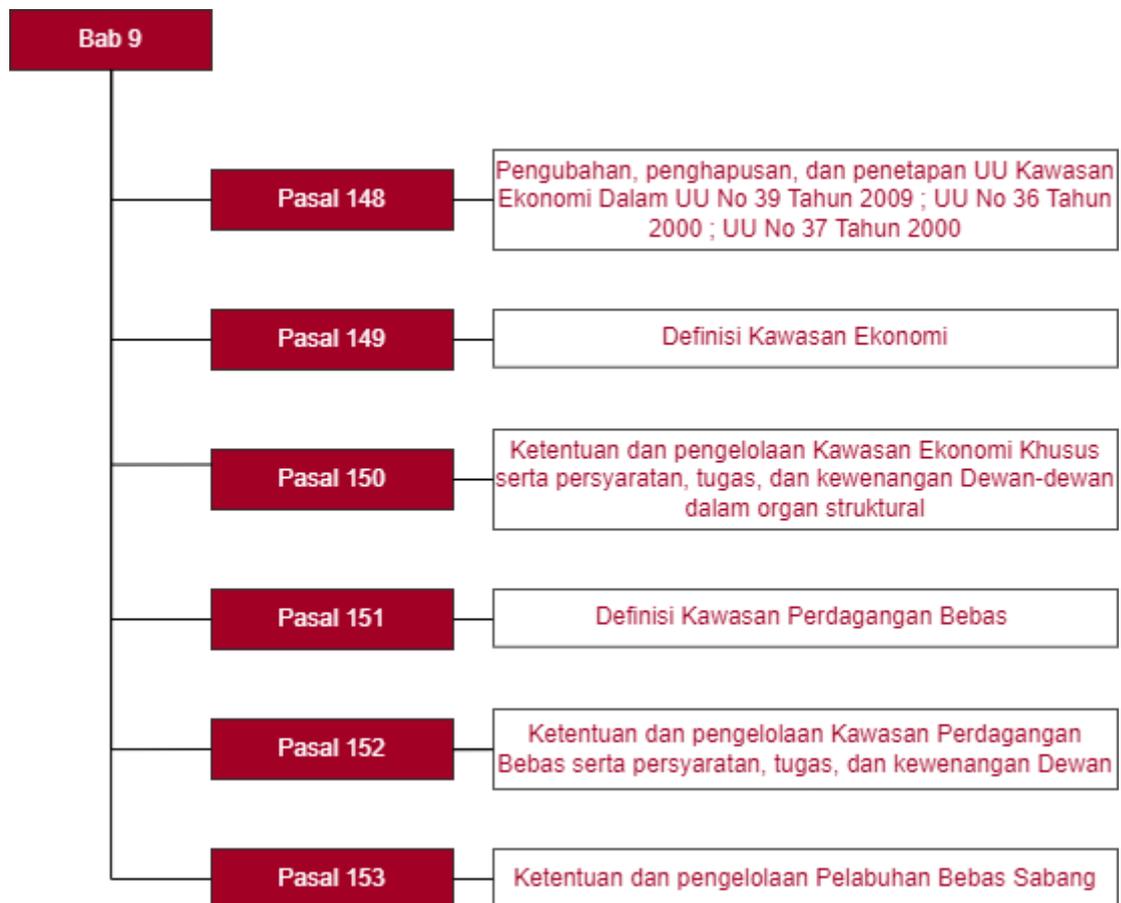
Pasal 146	Penjelasan tentang penggunaan tanah pada ruang atas tanah dan/atau ruang bawah tanah
Pasal 147	Format elektronik tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

### BAB IX : Kawasan Ekonomi

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 9



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab IX

Bagian Kesatu	
Pasal 148	Pembubahan, penghapusan, dan penetapan UU Kawasan Ekonomi Dalam UU No 39 Tahun 2009 ; UU No 36 Tahun 2000 ; UU No 37 Tahun 2000
Pasal 149	Definisi Kawasan Ekonomi
Bagian Kedua	
Pasal 150	Ketentuan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus serta persyaratan, tugas, dan kewenangan Dewan-dewan dalam organ struktural
Bagian Ketiga	

Ikhtisar:

**UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

---

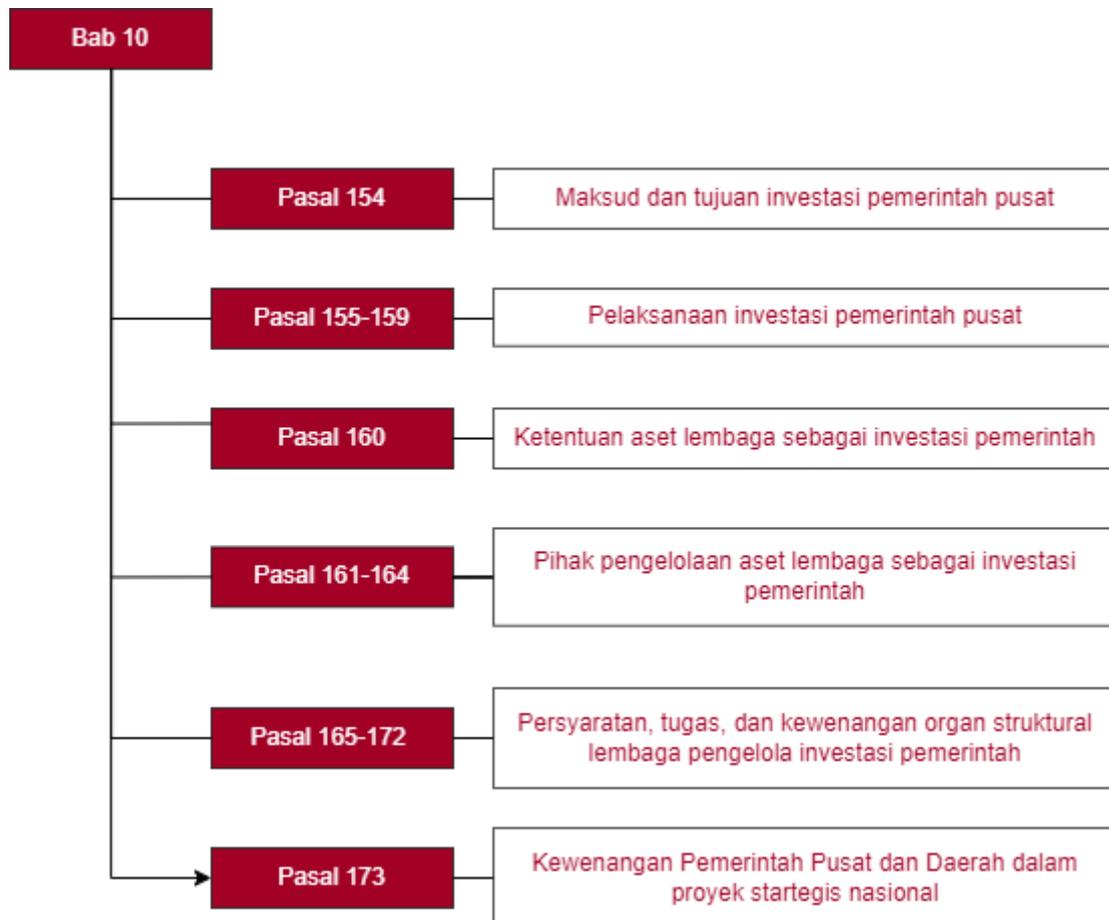
Pasal 151	Definisi Kawasan Perdagangan Bebas
Pasal 152	Ketentuan dan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas serta persyaratan, tugas, dan kewenangan Dewan
Pasal 153	Ketentuan dan pengelolaan Pelabuhan Bebas Sabang

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

### **BAB X : Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional**

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 10



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab X

Bagian Kesatu	
Pasal 154	Maksud dan tujuan investasi pemerintah pusat
Pasal 155-159	Pelaksanaan investasi pemerintah pusat
Pasal 160	Ketentuan aset lembaga sebagai investasi pemerintah
Pasal 161-164	Pihak pengelolaan aset lembaga sebagai investasi pemerintah
Pasal 165-172	Persyaratan, tugas, dan kewenangan organ struktural lembaga pengelola investasi pemerintah
Bagian kedua	

Ikhtisar:

**UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

---

Pasal 173	Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam proyek startegis nasional
-----------	--

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

### **BAB XI : Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja**

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 11



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab XI

Bagian kesatu	
Pasal 174	Pemberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Bagian kedua	
Pasal 175	Perubahan UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan - Persyaratan, tugas, dan kewenangan pihak-pihak dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan
Bagian ketiga	
Pasal 176	Perubahan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah - Tugas dan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan

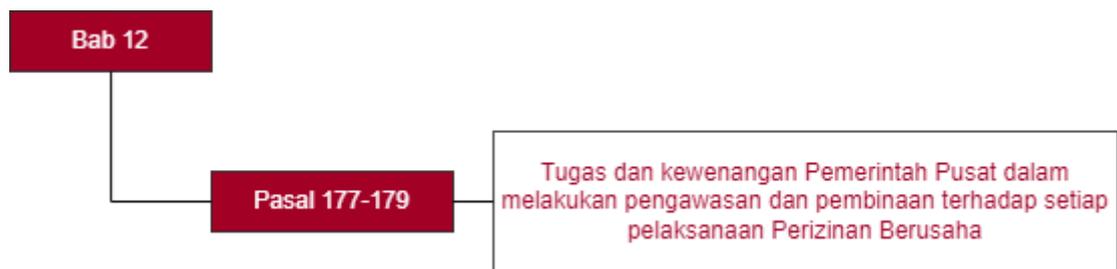
Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

---

### BAB XII : Pengawasan dan Pembinaan

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 12



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab XII

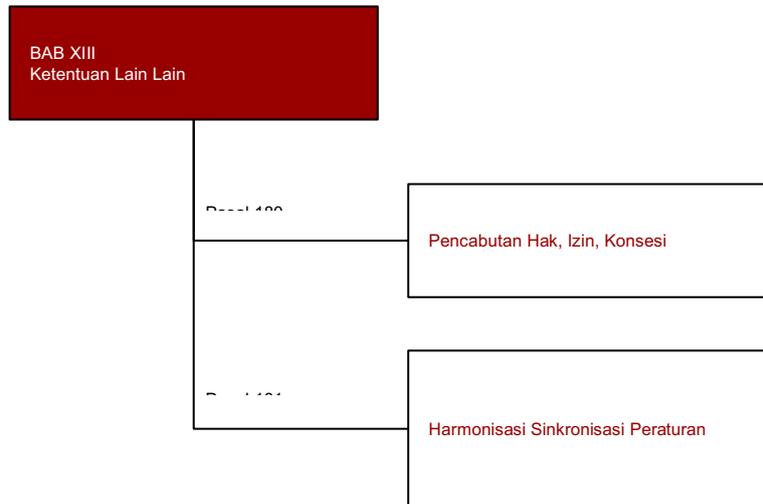
Pasal 177-179	Tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap pelaksanaan Perizinan Berusaha
---------------	---

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

### **BAB XIII : Ketentuan Lain-Lain**

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab XIII



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab XIII

Pasal 180	Pencabutan Hak, Izin, Konsesi atas Tanah/Kawasan
Pasal 181	Harmonisasi Sinkronisasi Peraturan yang berlaku

Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

### **BAB XIV : Ketentuan Peralihan**

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 14



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 14

Pasal 182	Ketentuan peralihan ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Pasal 183	Kelanjutan berdirinya Lembaga Pengelola Investasi

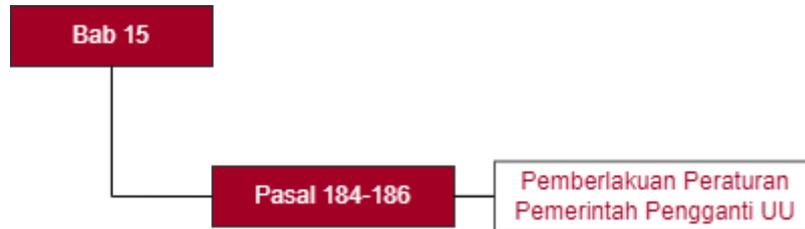
Ikhtisar:

## UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

---

### **BAB XV : Ketentuan Penutup**

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 15



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab X

Pasal 184-186	Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti UU dan Pencabutan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
---------------	---